

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan di organisasi berusaha mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan organisasi harus bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan strategi yang berfungsi sebagai petunjuk untuk pencapaian organisasi. Seluruh pihak yang terlibat didalam organisasi harus bekerja dengan baik agar bisa mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Kinerja organisasi merupakan suatu hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu tugas dan fungsi tertentu. Kinerja organisasi yang baik pasti akan menghasilkan aktivitas yang baik dan memiliki daya guna yang lebih. Tolak ukur suatu organisasi dikatakan baik apabila mampu memenuhi semua tugas dan fungsi yang telah diatur.

Salah satu alat yang penting untuk menunjang kinerja organisasi yang optimal dari sebuah instansi pemerintah daerah adalah dibutuhkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate/publik. Akuntabilitas publik juga berarti kewajiban untuk dapat bertanggung jawab tentang apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut dapat membantu pimpinan instansi pemerintah daerah untuk memberikan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk menciptakan kerja sama, baik secara kolektif maupun individual dan menjadi saluran bagi berbagai upaya dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik suatu instansi pemerintah daerah. pimpinan menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Dengan demikian kinerja organisasi dalam instansi pemerintah daerah memegang peran penting untuk tujuan pencapaian.

Dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa suatu instansi pemerintah daerah memiliki pedoman sistem pengendalian manajemen yang baik, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pengendalian manajemen yang telah dirancang tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi instansi pemerintah daerah.

Kepentingan suatu kinerja dibutuhkan untuk menilai seberapa jauh organisasi dapat menerapkan visi dan misinya agar tujuan organisasi dapat terwujud. Budaya organisasi yang baik perlu diterapkan kepada seluruh pihak yang berada didalam organisasi, karena budaya organisasi tidak lepas dari strategi organisasi, termasuk visi dan misi organisasi itu sendiri serta merupakan salah satu faktor penting implementasi strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Hubungan antara akuntabilitas publik dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi sangat berkaitan. sebagaimana pimpinan instansi pemerintah daerah akan menjunjung tinggi budaya organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses mewujudkan visi dan misi dari organisasi tersebut, dalam proses sistem pengendalian manajemen akan merencanakan suatu kegiatan operasi organisasi, baik rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan kegiatan yang efektif serta efisien, hasil setiap unit organisasi akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban untuk memberikan pernyataan tentang kebenaran dan kelayakan laporan tersebut, yang kemudian dijadikan penilaian kinerja organisasi.

Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat pada tahun 2020 mengenai penolakan Undang-undang cipta kerja, yang mengakibatkan mahasiswa maupun masyarakat menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk memberikan hasil kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang nomor 51 tahun 2008 tentang pembentukan kota Tangerang Selatan di provinsi Banten tertanggal 26 November

2008. Oleh sebab itu kota Tangerang Selatan menjadi salah satu kota termuda di Indonesia sehingga menarik untuk diteliti.

Sekretariat daerah merupakan unsur pembantu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Tugas dari seorang sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi tujuan utama dalam masa pemerintahannya. Begitu pun dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 46 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi:

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Pengordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah.
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah.
5. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Walikota.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang telah dijelaskan diatas, maka Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan oleh pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota.

Dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2019, permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Kebijakan daerah

Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dikarenakan tingkat implementasi kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah masih belum optimal.

2. Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi hal yang penting, dimana setiap instansi pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan harus memiliki kinerja yang berorientasi hasil dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Isu ini strategis bagi Sekretariat Daerah karena fungsi koordinasi pelaksanaan tugas fungsi organisasi perangkat daerah merupakan tugas Sekretariat Daerah, sehingga optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah akan menjadi indikator kinerja Sekretariat Daerah.

3. Paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat

Munculnya paradigma *new public service*, yang menempatkan aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat telah merubah orientasi pelayanan pemerintahan menjadi berorientasi kepada masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, menempatkan kepuasan pelayanan masyarakat sebagai indikator keberhasilan aparatur dan instansi pemerintah. Perubahan paradigma ini menjadi isu strategis karena belum sepenuhnya dipahami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

4. Kompetensi aparatur

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga untuk mewujudkan kinerja yang optimal diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten pada bidang tugasnya. Rendahnya budaya kerja aparatur sipil negara telah menjadi isu yang berkembang di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu mengenai kinerja organisasi, maka permasalahan tentang kebijakan daerah berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan, karena pengordinasian penyusunan kebijakan daerah merupakan tugas yang harus diselesaikan dan menjadi tujuan akhir dibentuknya Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Sistem pengendalian manajemen berfungsi untuk tujuan dari organisasi dapat tercapai, maka permasalahan tentang kebijakan daerah dapat

dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen dan mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Permasalahan akuntabilitas kinerja berkaitan dengan akuntabilitas publik yang diterapkan, dimana permasalahan akuntabilitas kinerja disebabkan minimnya kinerja yang berorientasi hasil dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Begitupun dengan fungsi dari akuntabilitas publik, yaitu mewajibkan kinerja yang berorientasi hasil dan dapat mempertanggungjawabkan, dengan begitu permasalahan akuntabilitas kinerja dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas publik dan mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Permasalahan paradigma aparatur sebagai pelayanan publik dan kompetensi aparatur berkaitan dengan budaya organisasi yang diterapkan, dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya budaya kerja yang diterapkan, sehingga terjadi permasalahan tersebut. Budaya organisasi berfungsi untuk memberikan norma dan dukungan kepada seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan apa yang telah diharapkan, dengan begitu permasalahan paradigma aparatur sebagai pelayanan publik dan kompetensi aparatur dipengaruhi oleh budaya organisasi dan mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Puspayani (2019), Pandeni, Sujana, & Sinarwati (2017), dan Indarwati (2017) ketiganya memperoleh hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahayuni (2013) yang memperoleh hasil bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kemudian penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suntoro (2017), Ningrum, Sari & Susilatri (2017), dan Sandanafu & Tjokro (2017) ketiganya memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anjami & Yaya (2016) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dan penelitian yang menggunakan

budaya organisasi sebagai variabel moderasi telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2018), Rusmita & Badera (2018), Sucitrawati & Sari (2017), dan Novatama (2019) keempatnya memperoleh hasil bahwa budaya organisasi sebagai variabel moderasi telah memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mardiansyah (2018) yang memperoleh hasil bahwa budaya organisasi tidak menjadi variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, terdapat beberapa peneliti yang memperoleh hasil yang tidak berpengaruh antar variabel, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan?
3. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan?
4. Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan semoga penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan penulis dan sebagai sarana pengeksploasian ilmu pada bidang audit, khususnya pada variabel yang diteliti.
2. Bagi akademik
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi akademisi, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan penulis lain yang ingin mengembangkan penelitian ini dengan metode dan responden yang lebih baik lagi.
3. Bagi instansi pemerintah daerah
Bagi instansi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja organisasi.

